

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2021

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 14 Juli 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., A.K
NIP.19790822 200502 2 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	20
V. Catatan atas Laporan Keuangan	22
A. Penjelasan Umum	22
A.1. Dasar Hukum.....	22
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	23
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	24
A.4. Basis Akuntansi	24
A.5. Dasar Pengukuran	25
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	25
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	33
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	33
B.2. Belanja.....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
C.1. Aset Lancar.....	39
C.2. Aset Tetap	40
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	44
C.6. Ekuitas.....	45
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	46
D.2. Beban Pegawai	46
D.3. Beban Persediaan	47
D.4. Beban Barang dan Jasa	48

D.5.	Beban Pemeliharaan	48
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	49
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	49
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	50
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	50
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	51
D.11.	Beban Lain-lain.....	51
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	52
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	54
E.1.	Ekuitas Awal	54
E.2.	Surplus (defisit) LO	54
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	54
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	54
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	55
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.....	55
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	55
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	56
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	56
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	56
E.3.	Ekuitas Akhir.....	57
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	58
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	58
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	58
	Laporan-laporan Pendukung.....	60
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	61
	Daftar Hibah Langsung.....	64

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020.....	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021.....	33
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020	34
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021	34
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021.....	35
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	35
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020	36
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020.....	38
Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020.....	39
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	39
Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni 2020.....	40
Tabel 14 Rincian Aset Tetap.....	41
Tabel 15 Rincian Saldo Tanah	41
Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020	45
Tabel 18 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2021.....	62
Tabel 19 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	65
Tabel 20 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Aktual.....	66

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 14 Juli 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

IYUNI FITHRIYAH, S.E., A.K
NIP.19790822 200502 2 001



RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul 30 Juni Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.457.000 atau mencapai 37,23 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp6.600.000.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp3.576.554.580 atau mencapai 48,42 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.385.954.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2021 dan TA 2020 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021			TA 2020
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara	6.600.000	2.457.000	37,23	3.649.200
Belanja Negara	7.385.954.000	3.576.554.580	48,42	3.311.392.730

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2021 dan 2020 .

Nilai Aset per 30 Juni 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.241.231.544, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp35.588.500; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp23.205.643.044; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp30.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp30.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp23.211.231.544, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp0 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp23.211.231.544.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2021 dan 2020 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2021	2020	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	35.588.500	8.500.500	27.088.000	318,66
Aset Tetap	23.205.643.044	23.589.945.797	(384.302.753)	(1,62)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	23.241.231.544	23.598.446.297	(357.214.753)	(1,51)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	30.000.000	10.974.637	19.025.363	173,35
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	30.000.000	10.974.637	19.025.363	173,35
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	0	0	0	0,00
Ekuitas Dana Investasi	23.211.231.544	23.587.471.660	(376.240.116)	(1,59)
Jumlah Ekuitas Dana	23.211.231.544	23.587.471.660	(376.240.116)	(1,59)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	23.241.231.544	23.598.446.297	(357.214.753)	(1,51)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp 2.457.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 3.952.794.696 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 3.950.337.696) Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp. 0, Pendapatan dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Adalah Rp. 0 dan Rp. 0 sehingga Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah Rp. 0, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa adalah (Rp. 3.950.337.696) dan Pos-Pos Luar Biasa sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp 3.950.337.696).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp 23.587.471.660 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp 3.950.337.696) kemudian ditambah dengan selisih revaluasi aset Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 3.574.097.580 dikurangi koreksi nilai aset tetap non revaluasi Rp 0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2021 adalah senilai Rp 23.211.231.544

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	6.600.000	2.457.000	37,23	3.649.200
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		6.600.000	2.457.000	37,23	3.649.200
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	6.198.991.000	2.929.441.891	47,26	2.762.687.754
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.149.463.000	647.112.689	56,30	548.704.976
3.	Belanja Modal	B.2.3.	37.500.000	0	0,00	0
	Jumlah Belanja Negara		7.385.954.000	3.576.554.580	48,42	3.311.392.730

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Persediaan	C.1. 2.	35.588.500	8.500.500
Jumlah Aset Lancar		35.588.500	8.500.500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	17.638.690.000	17.638.690.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.799.975.669	2.799.975.669
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	7.779.698.000	7.779.698.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	36.273.000	36.273.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	48.152.062	48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.097.145.687)	(4.712.842.934)
Jumlah Aset Tetap		23.205.643.044	23.589.945.797
Jumlah Aset		23.241.231.544	23.598.446.297
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	30.000.000	10.974.637
Uang Muka dari KPPN	5. 2.		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		30.000.000	10.974.637
Jumlah Kewajiban		30.000.000	10.974.637
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6	23.211.231.544	23.587.471.660
Jumlah Ekuitas Dana		23.211.231.544	23.587.471.660
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		23.241.231.544	23.598.446.297

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN OPERASIONAL PER 30 Juni 2021 DAN 2020 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2.457.000	3.649.200
Jumlah Pendapatan		2.457.000	3.649.200
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.929.441.891	2.762.687.754
Beban Persediaan	D. 3	47.067.800	18.326.390
Beban Barang dan Jasa	D. 4	339.988.704	318.016.420
Beban Pemeliharaan	D. 5	250.793.548	194.370.599
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	1.200.000	4.107.406
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	384.302.753	315.517.380
Jumlah Beban		3.952.794.696	3.613.025.949
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(3.950.337.696)	(3.609.376.749)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	54.950
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	54.950
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(3.950.337.696)	(3.609.321.799)
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(3.950.337.696)	(3.609.321.799)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2021	30 Juni 2020
Ekuitas Awal	E. 1	23.587.471.660	17.445.666.181
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(3.950.337.696)	(3.609.321.799)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Lain-lain	E. 7	0	0
Transaksi Antar Entitas		3.574.097.580	3.307.743.530
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 8	(376.240.116)	(301.578.269)
Ekuitas Akhir		23.211.231.544	17.144.087.912

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Pengadilan Negeri Bantul menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait penggunaan segmen akun khusus yang tepat dalam rangka belanja keperluan penanganan COVID-19 serta implikasinya terhadap pelaksanaan anggaran serta akuntansi dan pelaporan keuangannya:

1. Sesuai S-536/PB/2020 tanggal 23 Juni 2020 Pengadilan Negeri Bantul telah merealisasikan belanja terkait akun penanganan pandemi COVID-19 ke akun seharusnya .

2. Pengadilan Negeri Bantul telah mengalokasikan dana dan/atau telah merealisasikan belanja penanganan pandemi COVID-19 (telah terbit SP2D) dengan menggunakan akun-akun khusus COVID-19 maka Pengadilan Negeri Bantul tidak melakukan revisi anggaran (DIPA/POK) dan/atau ralat dokumen realisasi belanja (SPM/SP2D).

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
an
Negara
dan Hibah
: Rp
2.457.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp. 2.457.000 atau mencapai 37,23 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.600.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	2.457.000	37,23
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	2.457.000	37,23

- Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2021 mengalami Penurunan sebesar **(Rp. 1.192.200)** atau **(48,52)** persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena: Beberapa rumah dinas hakim dan panitera tidak ditempati dan yang menempati rumah dinas telah mutasi.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	2020	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.457.000	3.649.200	(1.192.200)	(48,52)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		2.457.000	3.649.200	(1.192.200)	(48,52)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara :
Rp
3.576.554.580

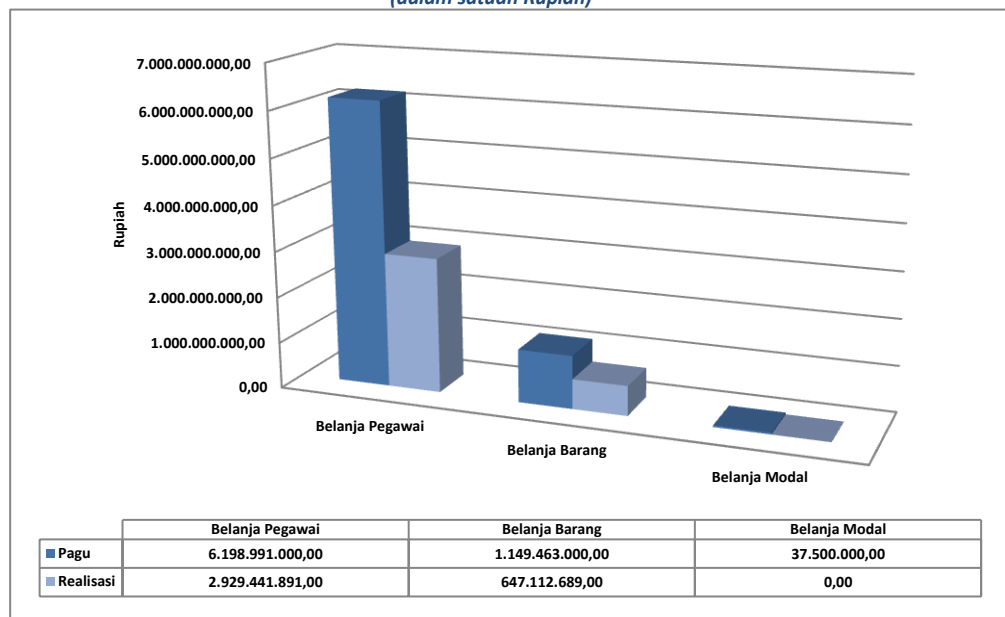
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2021 adalah sebesar Rp. 3.576.554.580 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 48,42% dari anggaran senilai Rp. 7.385.954.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	6.198.991.000	2.930.182.401	47,27
Belanja Barang	1.149.463.000	647.112.689	56,30
Belanja Modal	37.500.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	7.385.954.000	3.577.295.090	48,42
Pengembalian Belanja		(740.510)	0
Total Belanja Netto	7.385.954.000	3.576.554.580	48,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2021

- Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar **Rp.265.161.850,00** atau sebesar **7,41** persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2021 terserap cukup baik karena banyaknya mutasi masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul baik hakim maupun Panitera Pengganti serta Panmud dan juga terserapnya dengan baik belanja pemeliharaan .

Perbandingan realisasi belanja TA 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	5,69
Belanja Barang	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21
Belanja Modal	0	0	0	0,00
Total Belanja	3.576.554.580	3.311.392.730	265.161.850	7,41

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai
: Rp
2.929.441
.891*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.929.441.891 dan Rp. 2.762.687.754.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar **6,03** persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

Realisasi anggaran belanja pegawai pada TA 2021 terserap cukup baik karena banyaknya mutasi masuk ke kantor Pengadilan Negeri Bantul baik hakim maupun Panitera Pengganti serta Panmud.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.396.584.220	1.281.528.740	115.055.480	8,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.648	20.836	812	3,75
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.266.714	93.100.020	5.166.694	5,54
Beban Tunj. Anak PNS	26.918.816	26.650.466	268.350	1,00
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	996.030.000	973.545.000	22.485.000	2,30
Beban Tunj. PPh PNS	121.566.363	105.531.272	16.035.091	15,19
Beban Tunj. Beras PNS	76.676.640	63.367.500	13.309.140	21,00
Beban Uang Makan PNS	178.648.000	183.459.000	(4.811.000)	(2,62)
Beban Tunjangan Umum PNS	14.670.000	17.285.000	(3.355.050)	(19,41)
Total Belanja Brutto	2.930.182.401	2.762.687.834	167.494.567	5,72
Pengembalian Belanja	(740.510)	(80)	(740.430)	(99,99)
Total Belanja Netto	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	6,03

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp647.1
12.689*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 647.112.689 dan Rp. 548.704.976.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 mengalami Kenaikan sebesar **15,21** persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan antara lain: Pagu anggaran pada Tahun Anggaran 2021 lebih besar dari pada pagu anggaran Tahun Anggaran 2020 serta terealisasinya anggaran pemeliharaan yang cukup terealisasi dengan baik. Penyerapan anggaran yang baik untuk pemeliharaan kantor serta belanja jasa.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	320.054.899	495.963.481	(175.908.582)	(54,96)
Belanja Barang Non Operasional	814.000	5.021.640	(4.207.640)	(516,91)
Belanja Jasa	78.120.442	67.246.973	10.873.469	13,92
Belanja Pemeliharaan	246.923.348	193.761.899	53.161.449	21,53
Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000	4.107.406	(2.907.406)	(24,23)
Total Belanja Brutto	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	647.112.689	548.704.976	98.407.713	15,21

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal
:Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

- Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami kenaikan atau penurunan karena belanja modal pada Tahun Anggaran 2021 dan pada Tahun Anggaran 2020 sama-sama belum terealisasi pada periode yang sama.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.4 Belanja Terdampak Covid-19 – Belanja Barang

Pengadilan Negeri Bantul mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp8.000.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp3.072.200,00 yang digunakan untuk belanja barang operasional untuk menangani dampak pandemi covid-19 di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul sebesar Rp 2.258.200,- serta belanja non operasional sebesar Rp. 814.000,-

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
35.588.500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.588.500 dan Rp. 8.500.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
Persediaan	5.588.500	8.500.500
Total Aset Lancar	35.588.500	8.500.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 30.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2021	31 Desember TA 2020
1	Tunai	13.516.600	0
2	Rekening	13.503.471	0
3	Kuitansi UP	2.980.000	
	Jumlah	30.000.000	0

*)selisih kas pembulatan sebesar Rp. 71,-

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp35.588.500*

Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.588.500 dan Rp. 8.500.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan 30 Juni 2020

No.	Uraian	30 Juni 2021	30 Juni 2020
1	Barang Konsumsi	3.973.100	6.226.400
2	Amunisi	1.615.400	2.274.100
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	5.588.500	8.500.500

(sesuai dengan berita acara opname fisik persediaan NOMOR : W13.U5/1530/OT.01.2/VII/2021)

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
23.205.643.044*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020 tersaji sebesar Rp. 23.205.643.044 dan Rp. 23.589.945.797. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Perubahan
1	Tanah	17.638.690.000	17.638.690.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.799.975.669	2.799.975.669	0
3	Gedung dan Bangunan	7.779.698.000	7.779.698.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.273.000	36.273.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	28.302.788.731	28.302.788.731	0
	Akumulasi Penyusutan	(5.097.145.687)	(4.712.842.934)	(384.302.753)
	Nilai Buku Aset Tetap	23.205.643.044	23.589.945.797	(384.302.753)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp17.638.690.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 17.638.690.000 dan Rp. 17.638.690.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	295	SHP No.18/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	991.974.000
2	2	305	SHP No.17/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.017.339.000
3	3	324	SHP No.16/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.072.055.000
4	4	358	SHP No.36/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.194.123.000
5	5	391	SHP No.19/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.304.197.000
6	6	399	SHP No.20/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.330.880.000
7	7	434	SHP No.37/Bantul	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	1.436.025.000
8	8	630	SHP No.06/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Rumah Dinas	2.025.498.000
9	1	2.759	SHP No.07/ Ringinharjo	Pemerintah RI c.q MARI	Kantor	7.266.599.000
Jumlah						17.638.690.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.799.975.669*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.799.975.669 dan Rp. 2.799.975.669.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	2.799.975.669
Mutasi Tambah	
Komputer	0
UPS,PC,Server,Rak Server,Komputer Jaringan Lainnya	0
Mutasi Kurang	

Saldo per 30 Juni 2021	2.799.975.669
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	2.566.277.655
Nilai Buku 30 Juni 2021	233.698.014

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
7.779.698.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.779.698.000 dan Rp. 7.779.698.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2020	7.779.698.000
Mutasi Tambah	
Revaluasi aset	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	7.779.698.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	2.501.849.632
Nilai Buku 30 Juni 2021	5.277.848.368

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
36.273.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 36.273.000 dan Rp. 36.273.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	36.273.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Revaluasi aset	
Saldo per 30 Juni 2021	36.273.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	29.018.400
Nilai Buku 30 Juni 2021	7.254.600

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
48.152.062*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.152.062 dan Rp. 48.152.062.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2020	48.152.062
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2021	48.152.062
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	0
Nilai Buku 30 Juni 2021	48.152.062

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : (Rp
5.097.145.687)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing (Rp 5.097.145.687) dan (Rp 4.712.842.934).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.799.975.669	2.566.277.655	233.698.014
2	Gedung dan Bangunan	7.779.698.000	2.501.849.632	5.277.848.368
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	36.273.000	29.018.400	7.254.600
4	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	0	48.152.062
	Jumlah	10.664.098.731	5.097.145.687	5.566.953.044

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp30.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 10.974.637. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Muka dari KPPN	30.000.000	0
Utang kepada Pihak Ketiga	0	10.974.637
Jumlah	30.000.000	10.974.637

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 30.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
23.211.231.544*

Ekuitas per 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.211.231.544 dan Rp 23.587.471.660. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp 2.457.000 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 2.457.000 dan Rp 3.649.200. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.600.000	2.457.000	37,22
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	2.457.000	37,22

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2.929.441.891 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.929.441.891 dan Rp2.762.687.754. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.396.584.220	1.281.528.740	115.055.480	8,97
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.188	20.756	432	2,08
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.266.714	93.100.020	5.166.694	5,54
Beban Tunj. Anak PNS	26.918.816	26.650.466	268.350	1,00
Beban Tunj. Struktural PNS	20.800.000	18.200.000	2.600.000	14,28
Beban Tunj. Fungsional PNS	996.030.000	973.545.000	22.485.000	2,30
Beban Tunj. PPh PNS	121.566.363	105.531.272	16.035.091	15,19
Beban Tunj. Beras PNS	76.676.640	63.367.500	13.309.140	21,00
Beban Uang Makan PNS	178.648.000	183.459.000	(4.811.000)	(2,62)
Beban Tunjangan Umum PNS	13.929.950	17.285.000	(3.355.050)	(19,41)
Total Beban Pegawai	2.929.441.891	2.762.687.754	166.754.137	6,03

D.3. Beban Persediaan

Beban
Persediaan : Rp
47.067.800

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 47.067.800 dan Rp 18.326.390. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	47.067.800	18.326.390	28.741.410	156,83
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	47.067.800	18.326.390	28.741.410	156,83

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa : Rp
339.988.704*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 339.988.704 dan Rp 318.016.420. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	206.805.699	189.112.608	17.693.091	9,35
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.923.000	5.720.000	(1.797.000)	(31,41)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	21.570.000	23.250.000	(1.680.000)	(7,22)
Beban Barang Operasional Lainnya	37.472.000	33.696.076	3.775.924	11,20
Beban Barang Operasional- Penanganan COVID-19	2.258.200	5.683.074	(3.424.874)	(60,26)
Beban Bahan	0	5.021.640	(5.021.640)	(100,00)
Beban Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	814.000	0	814.000	0,00
Beban Langganan Listrik	55.400.944	54.121.578	1.279.366	2,36
Beban Langganan Telepon	678.861	798.144	(119.283)	(14,94)
Beban Langganan Air	1.346.000	613.300	732.700	119,46
Beban Sewa	9.720.000	0	9.720.000	0,00
Total Beban Barang dan Jasa	339.988.704	318.016.420	21.972.284	6,90

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 250.793.548*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 250.793.548 dan Rp 194.370.599. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	132.808.300	127.062.375	5.745.925	4,52
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	41.357.196	0	41.357.196	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	72.757.852	66.699.524	6.058.328	9,08
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	3.870.200	608.700	3.261.500	535,81
Total Beban Pemeliharaan	250.793.548	194.370.599	56.422.949	29,02

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
1.200.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1.200.000 dan Rp 4.107.406. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	150.000	3.807.406	(3.657.406)	(96,06)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.050.000	300.000	750.000	250,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	1.200.000	4.107.406	(2.907.406)	(70,78)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan

pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 384.302.753

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 384.302.753 dan Rp 315.517.380. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	67.944.249	87.681.749	(19.737.500)	(22,51)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.731.204	227.835.631	84.895.573	37,26
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.627.300	0	3.627.300	0,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	384.302.753	315.517.380	68.785.373	21,80

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp 0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional lainnya

Surplus/Defisit
Kegiatan Non
Operasional
lainnya : Rp 0

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	0	83.950	(83.950)	(100,00)
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	29.000	(29.000)	(100,00)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	54.950	(54.950)	(100,00)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

Beban Khusus Penanganan COVID-19

Beban khusus penanganan pandemi COVID-19 berupa beban barang operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 2.258.200,00 dan Beban Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp. 814.000,00 Seluruh belanja penanganan pandemi COVID-19 ini telah menggunakan akun yang telah sesuai dengan peraturan pemerintah dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.587.471.660 dan Rp 17.445.666.181

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp 3.950.337.696) dan (Rp 3.609.321.799) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Selisih revaluasi merupakan selisih aset tetap tanah yang merupakan koreksi kesalahan input inventarisasi dan penilaian, akibat dari revaluasi yang dilakukan selama tahun 2021 terhadap tanah.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 3.574.097.580 dan Rp 3.307.743.530.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(2.457.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.576.554.580
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	(3.574.097.580)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2021, DDEL sebesar (Rp 2.457.000) sedangkan DKEL sebesar Rp 3.576.554.580.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Transfer Masuk	Bentuk Transfer	Nilai Hibah
1	Mahkamah Agung	Barang	0
2			

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 23.211.231.544 dan Rp 17.144.087.912.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK pada Tahun Anggaran ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Rincian tentang informasi mengenai pendapatan belanja secara akrual disajikan dalam laporan pendukung laporan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. Virtual Account BRI Cabang Bantul nomor rekening : 653254001721000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp. 13.503.471,-

F.2.4. Revisi DIPA

Rincian tentang informasi mengenai revisi DIPA disajikan dalam laporan pendukung Catatan atas laporan keuangan ini.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM,SSBP dan SSPB pada periode Laporan Keuangan ini dibuat.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

- Sehubungan dengan tahapan restrukturisasi rekening pemerintah sesuai PMK 183/PMK.05/2019 tentang pengelolaan rekening pengeluaran milik kementerian/lembaga maka seluruh rekening bendahara pengeluaran berupa giro diganti dengan virtual account. Oleh karena itu kantor Pengadilan Negeri Bantul menutup rekening bendahara pengeluaran yang digantikan dengan virtual account.
- Sehubungan dengan adanya pandemi covid-19 yang telah terjadi dan juga instruksi dari Menteri Keuangan maka dalam rangka penanganan pandemi covid-19 dialokasikan pada anggaran khusus pandemi covid-19 dengan akun khusus juga. Kantor Pengadilan Negeri Bantul telah mengakomodir instruksi tersebut dengan mengalokasikan anggaran dan akun khusus tersebut dan telah dilaksanakan.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2020	2021	Per 30 Juni 2021	Per 30 Juni 2021
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	691.015.828	691.015.828	0	691.015.828	0
3	Alat Kantor	5	265.225.750	243.572.950	6.858.100	250.431.050	15.244.700
4	Alat Rumah Tangga	5	743.150.981	668.880.306	17.959.535	686.839.841	56.311.140
5	Alat Studio	5	37.566.000	26.490.800	3.003.600	29.494.400	8.071.600
6	Alat Komunikasi	5	7.890.000	7.890.000	0	7.890.000	0
7	Unit Alat Laboratorium	8	-	-	-	-	-
8	Komputer Unit	4	737.637.520	600.218.300	28.648.940	628.867.240	108.770.280
9	Peralatan Komputer	4	303.657.590	244.234.722	11.884.574	256.119.296	47.538.294
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	5.977.401.000	1.728.954.822	246.993.546	1.975.948.368	4.001.452.632
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.615.865.000	444.627.603	63.518.229	508.145.832	1.107.719.168

3	Tugu/tanda Batas	50	186.432.000	15.536.003	2.219.429	17.755.432	168.676.568
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
1	Jalan	10	36.273.000	25.391.100	3.627.300	29.018.400	7.254.600
D. Aset Tetap Lainnya							
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan							
1	Alat Angkutan Kendaraan Bermotor	5	850.000	850.000	0	850.000	0
2	Alat Kantor	5	38.872.000	38.872.000	0	38.872.000	0
3	Alat Rumah Tangga	5	17.366.000	17.366.000	0	17.366.000	0
4	Komputer Unit	4	1.833.000	1.833.000	0	1.833.000	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			10.679.485.669	4.773.733.434	384.713.253	5.158.446.687	5.521.038.982
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			10.679.485.669	4.773.733.434	384.713.253	5.158.446.687	5.521.038.982

Pengadilan Negeri Bantul
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
			Jumlah :				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan Keuangan

005
01
0400
400172

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}